

# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA**

**Abdul Samid Hidayatulloh**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

[samidabdul@gmail.com](mailto:samidabdul@gmail.com)

---

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di pulau sumatera tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh kabupaten dan kota di pulau sumatera, di dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* dimana didapat secara keseluruhan 462 sampel. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Luas Wilayah dan Belanja Modal Pemerintah Kota dan Kabupaten di seluruh sumatera**

---

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berimplikasi pada daerah-daerah baik itu kabupaten, kota maupun provinsi untuk memiliki hak, kewenangan dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki kewenangan dalam mengontrol terlaksananya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Pulau Sumatera Merupakan Pulau terbesar ketiga di Indonesia, dan

pulau ini juga merupakan pulau dengan jalur strategis perdagangan Internasional dan juga dekat dengan ibukota negara. Banyak Proyek Strategis Nasional yang di bangun di pulau sumatera, seharusnya penggunaan pos belanja modal tinggi. Berdasarkan Beritasumut.com Tahun 2018 ini setidaknya ada 17 Proyek Strategis Nasional yang ada di Sumut yang turut menjadi perhatian Pemprov Sumut. Kepala Bappeda Sumut menjelaskan, 17 proyek strategis nasional tersebut dibagi dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol, Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan PraSarana Kereta Api Antar Kota, Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas, Proyek Pipa Gas/Terminal LPG, Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum, Proyek Bendungan, Pembangunan

Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, dan Proyek Pembangunan Smelter. Sedangkan berdasarkan [sda.pu.go.id](http://sda.pu.go.id) Sumatera Selatan memiliki 13 proyek pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini tengah dikerjakan yakni pembangunan Bendungan Tiga hadji di OKU Selatan, progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api (KEK TAA) dan Pelabuhan Tanjung Carat, pembangunan Institut Olahraga Indonesia, serta pembangunan RSUD Provinsi Sumsel, Tol Palindra, Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, Tol Palembang-Tanjung Api api, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, Kereta Api Simpang TAA, Kereta Api Tanjung Enim-TAA, Kereta Api Palembang-Jambi, serta light rail transit (LRT). dari 13 proyek pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini tengah dikerjakan, sembilan diantaranya tidak ada kendala dan sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan Gubernur Sumatera Selatan berharap ada solusi dari presiden terkait proyek yang masih terkendala. Sebagai contoh pembangunan RSUD Provinsi Sumsel, secara keseluruhan bisa diselesaikan pada 2018. Bahkan, 2017 sudah bisa beroperasi, meski pembangunan belum 100 persen selesai. Progres saat ini, pembangunan fisik menggunakan APBD Rp49,5 miliar sampai selesai 2017. Kebutuhan alat kesehatan (alkes) totalnya mencapai Rp900 miliar yang dipenuhi dari APBD Sumsel di 2017 sebesar Rp98 miliar dan proyeksi dari APBD pada 2018 sebesar Rp100 miliar. masih diperlukan anggaran Rp800 miliar untuk alkes. Dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang dialokasikan ke belanja modal untuk membangun program prioritas nasional diharapkan pemerintah kabupaten dan kota Sumatera dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat sehingga masyarakat akan mampu

untuk mengembangkan potensi daerahnya.

## **KAJIAN DAN METODE**

### **BELANJA MODAL**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

### **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **DANA PERIMBANGAN**

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

## LUAS WILAYAH

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah, semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah dituntut untuk membangun berbagai fasilitas layanan publik seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Gedung Sekolah, jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat. Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan.

Menurut Peraturan menteri dalam Negeri no.72 tahun 2019 luas wilayah merupakan wilayah darat daerah provinsi dan kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, di dalam peraturan menteri no. 72 tahun 2019 ini juga menjelaskan bahwa luas wilayah di ukur dalam satuan  $KM^2$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai hubungan variabel independen, dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Luas wilayah dan variabel dependen, belanja modal. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di semua Provinsi di Pulau Sumatera periode 2017-2019.

Keterangan	Jumlah
<b>Kabupaten dan kota di Pulau Sumatera</b>	<b>154</b>
laporan keuangan pemerintah	(0)

kabupaten dan kota di sumatera yang tidak dapat di akses 2017-2019	
Pemerintah kota dan kabupaten di sumatera yang tidak mendapatkan dana perimbangan	(0)
Pemerintah Kota dan kabupaten yang data luas wilayahnya tidak bisa di akses	(0)
<b>Total Kabupaten dan kota di pulau sumatera yang tidak lengkap data variabel yang diteliti</b>	<b>(0)</b>
<b>Jumlah tahun yang menjadi sampel penelitian</b>	<b>3</b>
<b>Total Jumlah observasi secara keseluruhan (3 tahun x 154 kabupaten dan kota)</b>	<b>462</b>

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

## UJI ASUMSI KLASIK

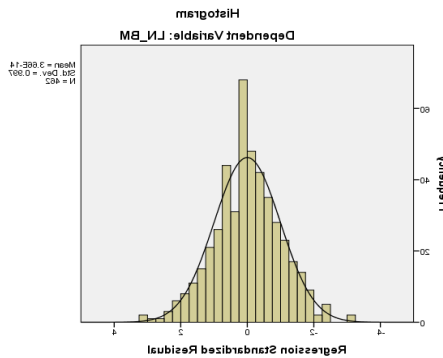
### Uji Normalitas

#### Uji Kolmogorov Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,081, nilai tersebut di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dari uji di atas, menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Histogram

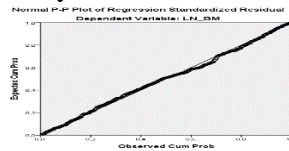
Model regresi penelitian ini terlihat terdistribusi normal pada gambar IV.1 terlihat bahwa grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal atau tepat di tengah. Terlihat bahwa tidak terjadi kemencengan/ tidak seimbang.



Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

### Uji Analisis Grafik

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal maka dilakukan uji Normal Probablity Plot.



Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Pada gambar IV.2 dapat dilihat pola penyebarannya yaitu data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu menunjukkan data terdistribusi secara normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan analisis kolgomorov – Smirnov dan analisis grafik

menunjukkan bahwa data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_P	,471	2,125
	AD		
	LN_D	,369	2,708
	P		
	LN_L	,628	1,593
	W		

Dependent Variable:  
LN\_BM

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Tabel IV.4 menunjukkan nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih dari 0,10. Artinya, tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hal ini diperkuat dengan nilai VIF untuk semua variabel independen yang kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabelin dependen didalam model regresi tidak memiliki masalah multikorelasi.

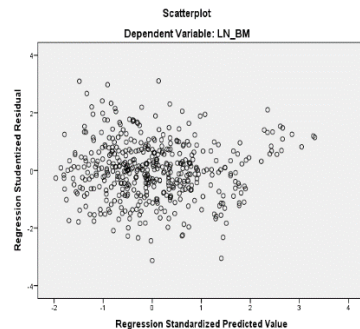
### Uji Autokolerasi

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data(n) = 462, serta k=3 (adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,83820 dan nilai dU sebesar 1,85567 sehingga nilai 4-dL= 2,1618 dan 4-dU= 2,14433 terletak diantara dU dan 4-dU (1,85567<dw<2,187) yang berartimodel regresi terbebas dari masalah autokorelasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini sudah memenuhi asumsi autokorelasi.

### Uji Heterokedasitas

#### Uji Scatter Plot



Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2020

Dari Uji Scatter Plot dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu pola tertentu yang teratur yang tergambar pada hasil pengujian tersebut.

#### Uji Glejser

Berdasarkan Uji Glejser diketahui bahwa nilai signifikansi variable PAD sebesar 0,801, Dana Perimbangan sebesar 0,863, dan Luas Wilayah sebesar 0,854 seluruh variabel X memiliki nilai  $\text{sig} > 0.05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas nilai residual dari setiap variabel dalam penelitian ini memiliki signifikansi di atas 0,05 sehingga memenuhi asumsi homoskedasitas atau bebas dari heteroskedasitas.

#### Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan dalam tabel IV.7 di atas maka dapat

dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$BM = 3,421 + (0,073.PAD) + (0,758.DP) + (0,019.LW) + e$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 3,421, artinya jika PAD, Dana Perimbangan, Luas Wilayah, tetap bernilai (konstan), maka belanja modal bernilai 3.421. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,073 mempunyai arti jika variabel independen lain bernilai konstan dan variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1% maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,073. Koefisien bertanda Positif yang berarti terjadi hubungan Positif dan apabila pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan Semakin Bertambah.

Nilai koefisien variabel dana perimbangan sebesar 0,758 mempunyai arti jika variabel independen lain bernilai konstan dan variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1% maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,0758. Koefisien bertanda Positif yang berarti terjadi hubungan Positif dan apabila pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan semakin bertambah.

Nilai koefisien variabel luas wilayah sebesar 0,019, artinya ketika variabel luas wilayah meningkat 1% maka variabel belanja modal akan bertambah sebesar 0,019. Koefisien bertanda positif yang berarti, terjadi hubungan positif dan apabila luas wilayah bertambah maka belanja modal juga akan semakin bertambah

**Uji Hipotesis**  
**Uji Statistik T**  
Pengujian Hipotesis 1

Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, variabel PAD berpengaruh secara signifikan secara statistik terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai  $t_{tabel} < t_{hitung}$  (1,96516 < 2,394). Untuk uji signifikansi konstanta dan variabel independen, dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,017 <  $\alpha(0,050)$  **Maka dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima.** Dengan demikian ketika PAD mengalami peningkatan maka nilai belanja modal akan semakin meningkat.

Pengujian Hipotesis 2  
Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara tidak signifikan dengan arah Positif secara statistik terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai  $t_{tabel} < t_{hitung}$  (1,96516 < 10,492). Untuk uji signifikansi konstanta dan variabel independen, dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 <  $\alpha(0,050)$  **Maka dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima.** Dengan demikian ketika Dana Perimbangan mengalami peningkatan maka nilai belanja modal akan semakin signifikan.

Pengujian Hipotesis 3

Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara tidak signifikan secara statistik terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai  $t_{tabel} > t_{hitung}$  (1,96516 > 1,354). Untuk uji signifikansi konstanta dan variabel independen, dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,176 >  $\alpha(0,050)$  **Maka dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak.** Dengan demikian luas wilayah tidak mempengaruhi belanja modal.

**Uji Statistik F**

Pengambilan keputusan pada uji statistik F dapat dilihat dari perbandingan nilai  $F_{tabel}$  dan  $F_{hitung}$ . Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dilihat bahwa  $F_{hitung}$  yang dihasilkan adalah sebesar 139.279. Sedangkan  $F_{tabel}$  dihitung berdasarkan pada tabel F dengan nilai  $df_1 = 3$  variabel (jumlah variabel-1) dan  $df_2 = 459$  ( $n-k-1$ ), dimana  $n$  sebesar 462 adalah jumlah observasi dan  $k = 3$  adalah jumlah variabel independen). Dengan demikian, dengan tingkat signifikansi 5%, didapatkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,62.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 139,279 >  $F_{tabel}$  sebesar 2,62. Jadi, Hal ini berarti model yang digunakan

pada penelitian ini adalah layak (fit).

Hal tersebut dibuktikan juga dengan nilai signifikansi yang dihasilkan dari tabel di atas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari derajat kepercayaan sebesar 0,05 atau 5%.

### **Uji R<sup>2</sup>**

Berdasarkan Tabel Uji R<sup>2</sup> tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya R<sup>2</sup> adalah 0,477. Hal ini berarti 47,7% variabel dependen yaitu belanja modal, dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yang masuk dalam model regresi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, luas wilayah. Sedangkan sisanya sebesar 52,3% (100%-47,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal karena pendapatan asli daerah merupakan komponen penerimaan yang paling penting bagi setiap daerah hal ini dikarenakan suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam daerah tersebut dengan mandiri, dengan adanya pendapatan asli daerah yang mana pemerintah daerah memperoleh dana dari PAD dapat mengalokasikan atau dianggarkan dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur daerah dan pengadaan aset tetap dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat umum, sedangkan pada penelitian ini

pemerintah daerah dalam hal belanja modal sangat berpengaruh dan mempertimbangkan penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah tersebut mengalami peningkatan akan berbanding berbanding lurus dengan belanja modal.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal**

Dana Perimbangan merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Transfer pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk menunjang dan membantu pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berupa belanja modal.

Dengan Semakin tinggi Alokasi Transfer APBN Kepada APBD dalam Dana Perimbangan diharapkan membuat pemerintah daerah memprioritaskannya untuk Belanja Modal karena berkaitan dengan pelayanan publik.

Dana Perimbangan yang meningkat akan mampu menunjang belanja modal yang belum dapat dilakukan oleh daerah karena keterbatasan anggaran dan kemampuan setiap daerah tentunya berbeda dalam hal pendapatan asli daerah, setiap daerah apabila menjalankan pembangunan dengan dana PAD saja akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin tinggi. maka dari itu melalui dana perimbangan pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi fiskal, yang nantinya pemerintah daerah dalam melakukan tambahan belanja

bersumber dari dana perimbangan tersebut.

### **Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal**

Daerah yang memiliki luas wilayah yang besar dalam prinsipnya akan membutuhkan belanja modal yang besar karena kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut juga tinggi, hal ini untuk menunjang pelayanan dan kegiatan atau kebutuhan masyarakat secara umum, hal ini juga untuk menghindari kesenjangan taraf hidup masyarakat serta pembangunan wilayah. Kelancaran kegiatan aktivitas masyarakat membutuhkan kondisi sarana infrastruktur yang baik. Sehingga luas wilayah sangat berhubungan dengan belanja modal.

Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa luas wilayah bukan menjadi faktor yang membuat belanja modal yang semakin besar, hal ini dikarenakan sumber dana anggaran yang dihasilkan untuk belanja modal sangatlah terbatas, jadi pemerintah kabupaten dan kota harus menetapkan belanja modal berdasarkan skala prioritas dan faktor lain nya seperti politik, sosial dan ekonomi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penulisan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan semakin besar pendapatan asli daerah disuatu wilayah maka semakin meningkat tingkat belanja modalnya.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan semakin besar

dana perimbangan yang diterima disuatu wilayah maka semakin besar tingkat belanja modalnya.

3. Tidak terdapat pengaruh antara luas wilayah dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya luas wilayah maka tidak akan mempengaruhi besarnya belanja modalnya.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pemberian hak, kewajiban, wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan atau biasa disebut otonomi daerah, merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan kewenangan yang menjadi hak daerah, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah, Implementasi dari pendapatan asli daerah sendiri dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang harus diutamakan dari sumber pendanaan yang lainnya, karena dengan pendapatan asli daerah yang maksimal maka akan menambah sumber pembiayaan daerah dalam hal belanja modal secara mandiri. Belanja modal yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemenuhan infrastruktur yang merata dan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

#### 2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari



Transfer APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berupa belanja modal. Semakin tinggi Alokasi Transfer APBN Kepada APBD dalam Dana Perimbangan diharapkan membuat pemerintah daerah memprioritaskannya untuk Belanja Modal karena dengan belanja modal yang tinggi pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur yang layak untuk masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik dan serta dapat meningkatkan nilai investasi didalam daerah itu sendiri

### 3. Pengaruh luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Luas wilayah memiliki pengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota. Semakin luasnya suatu wilayah pada daerah harus diimbangi dengan fasilitas publik dan infrastruktur daerah. Kegiatan perekonomian masyarakat ditunjang oleh fasilitas yang baik sehingga roda perekonomian masyarakat dapat meningkat. Jika roda perekonomian di daerah mengalami peningkatan maka penerimaan daerah bisa mengalami peningkatan.

Dari hasil penulisan tiga variabel di atas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Sehingga pemerintah daerah tidak salah dalam menentukan langkah untuk perkembangan daerahnya ke depan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik yang baik akan membawa dampak yang positif terhadap kualitas pelayanan publik serta perkembangan di daerah tersebut.

## Saran

Untuk penelitian yang lebih baik, maka saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah luas tahun pengamatan lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya juga meneliti variabel lain seperti tingkat investasi daerah dan indeks pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menghasilkan penelitian yang utuh. Hal ini didasarkan bahwa variabel penelitian ini pengaruhnya terhadap belanja modal sebesar 47,7% sehingga masih ada 52,3% variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap belanja modal
3. Bagi pemerintah daerah, sebaiknya mengoptimalkan pengelolaan belanja modalnya agar bisa membawa dampak yang positif terhadap masyarakat dan kualitas pelayanannya.
4. Bagi pemerintah daerah, sebaiknya melakukan evaluasi terhadap belanja sehingga porsi belanja modal memiliki porsi yang besar dibandingkan porsi belanja yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erlis, Nola. "Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan SilPA terhadap belanja modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi". **Jurnal Fakultas Ekonomi**. Universitas Bung Hatta. 2014.
- Ghozali, Imam. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Jakarta: Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Jensen, M and Mecking, W. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure". **Journal of financial Economics** 3 (4). 1976. Page 305-360
- Kuncoro, M. Metode **Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi kedua. Erlangga. Jakarta. 2007.
- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh)". **Jurnal Akuntansi Universitas Syah Kuala**, 2013, hal 80- 90.
- Panji, Putu Ngurah, dan A.A.N.B Dwirandra. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi", **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana**, 2014, 9, hal 79-92.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan No 101 2011 tentang Klasifikasi anggaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Peraturan Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putra, Pande Putu Maesa Eka, dan Made Heny Urmila Dewi, "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.", **E-Jurnal EP Unud**, 2018, hal 2163-2189.
- Priatna, Husaeri, dan Jaya Purwadinata, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung", **Jurnal Ilmu Sosial dan Poitik**, 2019, hal 62-74.
- Nufus, Hayatun, dan Jhon Andra Asmara, "Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus sebagai Pemoderasi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh", **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)**, 2017, hal 1-9.
- Nugraeni, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerahn

Kabupaten/Kota di Indonesia”. **Jurnal Akademika UPY**, 2011.  
Rahman, Herlina. **Pendapatan Asli Daerah**. Jakarta: Arifgosita. 2005

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. **Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian**. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2017.

Sugiyono. **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung: Penerbit Alfabet. 2009

Wibisono, Nurharibnu, dan Arini Wildaniati, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SilPA, dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal”, **Jurnal Ilmu Ekonomi**, 2016, hal 12-20.

Widiagma, Aditya Putra. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur”. **Jurnal Ekonomi**. Universitas Jember. 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

<http://www.ksap.org/> (Diakses tanggal 5 April 2020)

<http://sda.pu.go.id/bbwssumatera8/2017/03/25/pemprov-bahas-13-proyek-strategis-nasional-di-sumsel/> ( Diakses tanggal 23 Agustus 2020)

<https://beritasumut.com/politik-pemerintahan/Ada-17-Proyek-Strategis-Nasional-untuk-Pemprov-Sumut-Tahun-2018>  
(Diakses Tanggal 24 Agustus 2020)